



Analisis Peran Pemerintah dalam Mengupayakan Pencegahan Stunting Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Kecamatan Ampek Angkek

Tito Andryansyah¹, Sandra Dewi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Korespondensi penulis: titoandryansyah54@gmail.com¹

Abstract. Study "Analysis of the Government's Role in Efforts to Prevent Stunting to Create Quality Human Resources in Ampek Angkek District". Theoretically, this study is driven by the quality of human resources, which is quite crucial in determining economic development. Since economic development follows the rise in human resources. By examining the government's involvement in trying to avoid stunting to produce excellent human resources in the Ampek Angkek sub-district which transpires in the past, data from the research field indicates the other direction. This kind of research is field case study research using a descriptive qualitative methodology which analyzes data using interview techniques, documentation and other sources carried out at the sub-district government and numerous cross-sectors in the Ampek Angkek sub-district. Based on the findings of the research and data analysis that has been conducted, it can be concluded that there are several shortcomings, mainly: 1. The role of government and cross-sectors has been carried out in accordance with their roles and duties, but there may be shortcomings that have not been optimal, such as uniting cross-sectors that have not been implemented or generating convergence. 2. Insufficient facilities and TPK not proportionate for the size of the region to overcome stunting cases 3. Insufficient information, understanding, or community involvement in helping to avoid stunting.

Keywords: The role of government, stunting, human resources.

Abstrak. Penelitian "Analisis Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Stunting Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas di Kecamatan Ampek Angkek". Secara teoritis, kajian ini didorong oleh kualitas sumber daya manusia yang cukup menentukan dalam menentukan pembangunan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi mengikuti peningkatan sumber daya manusia. Jika melihat keterlibatan pemerintah dalam upaya pencegahan stunting untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul di Kecamatan Ampek Angkek yang terjadi pada masa lalu, data penelitian di lapangan menunjukkan arah sebaliknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus lapangan dengan metodologi deskriptif kualitatif yang analisis datanya menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan sumber-sumber lain yang dilakukan pada pemerintah kecamatan dan berbagai lintas sektor di wilayah Kecamatan Ampek Angkek. Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kekurangan, terutama: 1. Peran pemerintah dan lintas sektor sudah dijalankan sesuai dengan peran dan tugasnya, namun mungkin terdapat kekurangan yang belum optimal, seperti belum terlaksananya pemersatu lintas sektor atau menimbulkan konvergensi. 2. Kurangnya fasilitas dan TPK yang tidak sebanding dengan luas wilayah untuk mengatasi kasus stunting. 3. Kurangnya informasi, pemahaman, atau keterlibatan masyarakat dalam membantu pencegahan stunting.

Kata kunci: Peran pemerintah, Stunting, SDM.

1. LATAR BELAKANG

Yang termasuk negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks ini, terdapat pula permasalahan besar, yaitu stunting. Diluncurkan pada bulan Agustus 2017, Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting harus menggarisbawahi kegiatan konvergensi di tingkat nasional, daerah, dan desa untuk menjadikan kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif sebagai prioritas utama dalam

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hingga usia 6 tahun. . Secara umum, bidang kesehatan menerapkan intervensi gizi khusus yang menyoasar ibu hamil dan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan kontribusi sebesar 30% dalam rangka menurunkan stunting. Intervensi Gizi Sensitif bertujuan pada beberapa upaya pembangunan di luar bidang kesehatan dengan kontribusi sebesar 70% dalam menurunkan angka stunting dengan sasaran masyarakat umum dan tidak khususnya ibu hamil dan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).(Nastiti Novia Ayuningtias 2018)

Keterlibatan pemerintah dalam menentukan angka stunting menggunakan Perpres 72 Tahun 2021.Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana strategi pemerintah dalam menurunkan stunting di Kecamatan Ampek Angkek yang difokuskan dilakukan sejak tahun 2022.Stunting merupakan tumbuh kembang anak sejak dini.khas untuk usianya yang menyimpang dari rata-rata. Pembicaraan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada seseorang mengenai upaya dan efisiensi pemerintah terhadap masyarakat. Analisis kebijakan publik dan indikasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan akan membantu seseorang dalam memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. (Elly 2024)

Menurut data Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia berkisar 27,67% dan merupakan salah satu angka tertinggi di Asia Tenggara. Stunting umumnya terjadi karena gizi buruk pada tahun-tahun awal perkembangan manusia khususnya anak-anak, kurangnya asupan zat gizi penting seperti protein, vitamin dan mineral. Terdapat faktor lain yang berkontribusi terhadap permasalahan stunting, seperti kemiskinan, kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi gizi, buruknya pengetahuan dan praktik kesehatan, berat badan lahir rendah, gizi ibu yang tidak memadai, dan masih banyak lagi. Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam penanggulangan stunting melalui berbagai program seperti Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang bertujuan untuk mengatasi stunting dan gizi buruk secara komprehensif. Peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting di Kecamatan Ampek Angkek difokuskan dilaksanakan sejak tahun 2022.Stunting merupakan stunting pada anak.pertumbuhan dari pertumbuhan rata-rata untuk anak seusianya. Tujuan diskusi ini agar mengetahui upaya dan efektifitas pemerintah terhadap masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah akan dilihat berdasarkan analisis kebijakan publik dan indikator permasalahan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan.(Latifah Suhada 2018)

Hal ini disebabkan karena unsur-unsur utama yang menghalangi berkembangnya koneksi dalam masyarakat dan fasilitas belum terpenuhi dan memadai; keterlibatan masyarakat yang

aktif dan hubungan yang kuat antar kelompok masyarakat menentukan hal ini. Faktor penghubung modal sosial hingga saat ini belum banyak dikembangkan untuk membantu menurunkan angka stunting di Ampek, Kabupaten Angkek Agam. Pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat masih sedikit melakukan kerja sama dan belum mencapai derajat ideal. Sementara itu, upaya penurunan stunting di Kabupaten Agam belum melihat secara jelas fungsi keterhubungan dalam modal sosial.

Penelitian mengenai komponen pengikat modal sosial menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting di Ampek Angkek, Kabupaten Agam, kurang berhasil. Angka stunting di Kabupaten Agam Kabupaten Ampek Angkek saat ini tercatat sebesar 7,33%.

Tabel 1.1 Angka Stunting Tiap Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2022-2023

Nagari	2022			2023		
	Jumlah di Ukur	Jumlah Stunting	Persen %	Jumlah di Ukur	Jumlah Stunting	Persen %
Biaro Gadang	445	36	8,1	478	47	9,8
Balai Gurah	336	31	9,2	345	30	8,7
A.Gadang	793	49	6,2	819	54	6,6
Lambah	218	13	6,0	238	22	9,2
Panampuang	464	23	5,0	411	49	11,9
Pasia	231	6	2,6	250	5	2,0
Batu Taba	464	14	2,7	524	18	3,4
Jumlah	3000	172	5,7	3065	225	7,33

Sumber: EPPBGM (Elektronik-Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis

Tabel 1.1 di atas menunjukkan derajat angka stunting di Kecamatan Ampek Angkek dari tahun 2022 terhadap tahun 2023. Angka stunting pada tahun 2022 sebesar 5,7%; pada tahun 2023 sebesar 7,3%). Boleh dikatakan angka stunting di Kecamatan Ampek Angkek naik 1,63%.

Situasi perekonomian suatu negara sangat menentukan program stunting. Perkembangan mental dan fisik anak-anak mungkin terpengaruh dalam kondisi dimana kekurangan gizi jangka panjang membatasi pertumbuhan mereka. Produksinya di masa depan mungkin akan terkena dampaknya, yang tentu saja berdampak pada perekonomian. Perubahan tidak akan terjadi apabila masyarakat tidak berusaha untuk berani mengubah hidupnya dengan melakukan aktivitas seperti mengubah pola hidup yang tidak baik menjadi lebih baik, baik dari segi pangan, kebersihan, lingkungan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang merupakan hal-hal yang paling penting. modal utama dalam mencapai kemakmuran, kekayaan, dan menciptakan kesejahteraan. di dunia ini. Jika stunting merupakan hal yang umum di suatu

negara, banyak orang tidak akan mampu mewujudkan potensi mereka secara maksimal karena kendala fisik dan psikologis. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membantu perekonomian nasional sebanyak yang mereka inginkan. Selain itu, mengatasi stunting memerlukan pengeluaran yang sangat besar untuk program kesehatan dan gizi, yang dapat membebani perekonomian nasional.

Bagaikan sebuah fatamorgana, pencapaian pembangunan ekonomi yang besar belum mencerminkan kondisi sumber daya manusia yang sebenarnya. Kesenjangan semakin mendalam ketika kue pembangunan hanya diapresiasi oleh segelintir orang saja. Begitu pula dengan modal (padat modal) yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dibandingkan sumber daya manusia (padat karya). Hal ini terlihat pada industri yang menyediakan sumber daya manusia terbanyak, seperti sektor pertanian, yang pertumbuhan dan kontribusinya lebih kecil dibandingkan sektor lainnya. Hal ini berarti bahwa hanya satu persen pembangunan ekonomi yang dapat menyediakan sejumlah kecil lapangan kerja baru. Buruknya kualitas persalinan merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia di masa depan. Masih terbilang tinggi, angka prevalensi tengkes (stunting) pada anak balita di Indonesia mencerminkan hal tersebut. Pemerintah menargetkan angka prevalensi pada tahun 2022 turun sebesar 3 persen atau menjadi 21 persen dari tahun 2021 sebesar 24,4 persen. Banyaknya jumlah tengkes di Indonesia menunjukkan belum memadainya kualitas pelayanan kesehatan dan gizi yang tersedia bagi ibu hamil. Sebenarnya, anggaran selalu meningkat setiap tahunnya. Rendahnya jumlah tengkes akan sangat mempengaruhi kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki negara Indonesia di masa depan. (Ade Nur Aida 2019)

Di setiap wilayah, terdapat lebih banyak kasus stunting, terutama di komunitas kecil di pedesaan. Fokus pemerintah daerah pada pemerintah kecil yang perlu menggunakan strategi untuk memerangi stunting telah menyebabkan penerapan program stunting. Kabupaten Ampek Angkek termasuk salah satu daerah dengan kasus stunting tertinggi karena kesehatan masyarakat kurang mendapat perhatian dan masyarakat juga lalai dalam menerapkan program stunting. layanan kesehatan yang disediakan oleh wilayah tersebut. Banyaknya pernikahan di bawah umur serta berbagai situasi seperti hubungan di luar nikah dan program masyarakat sendiri atau kelalaian terhadap kesehatan anak balita yang dilakukan oleh daerah; jadi, tidak ada bayaran bagi yang punya anak balita. Ditetapkan karena angka prevalensi e-PPBM Sumbar pada tahun 2022 sebesar 25,2% meningkat dibandingkan tahun 2021; khususnya, angka ini 1,9% di atas rata-rata nasional sebesar 21,6%. Sedangkan di Kabupaten Agam sebesar 30,0%.6 Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai program stunting, keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah masih lemah, partisipasi masyarakat dalam

mengikuti sosialisasi yang diberikan pemerintah masih kurang memadai. turunkan angka ini. Selain mengadopsi program stunting di Nagari, Kabupaten Ampek Angkek juga menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik untuk meningkatkan perekonomian.

2. METODE PENELITIAN

Sebagai studi lapangan deskriptif kualitatif, studi ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari individu dan perilaku yang dicatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan atau situasi bahkan kejadian sebagaimana adanya sehingga mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dan memberikan gambaran obyektif tentang apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Kajian mendalam terhadap orang, perusahaan, peristiwa, dan sebagainya sepanjang kurun waktu yang telah ditentukan berupaya memberikan gambaran menyeluruh dan komprehensif mengenai suatu entitas. Ini menghasilkan data yang cocok untuk dianalisis guna menghasilkan hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran Pemerintah Dalam Mengupayakan Pencegahan Stunting Untuk Mewujudkan SDM Yang Berkualitas

Salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengatasi stunting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul adalah dengan mendukung salah satu unsur dalam pengembangan program negara, yaitu pertumbuhan ekonomi. Dimana kontribusi sumber daya manusia terhadap keberlangsungan perekonomian masyarakat sangatlah besar. Dimana, baik jangka panjang maupun jangka pendek, pemerintah juga merencanakan dan menyelenggarakan inisiatif-inisiatif untuk mengentaskan permasalahan stunting ini. Berikut hasil wawancaranya: *“Untuk program stunting ini, pemerintah kecamatan hanya berperan sebagai fasilitator. Dimana menawarkan sarana dan prasarana baik dari segi material maupun non material”*. (Angkek 2024)

Informan juga mengatakan dalam wawancara bahwa kebijakan dan program yang ditetapkan datang langsung dari kabupaten dan hanya menjalankan inisiatif yang sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat jelas bahwa keterlibatan pemerintah dalam program stunting ini berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan berbagai kemudahan. Pemerintah juga telah mengembangkan inisiatif dan tindakan spesifik yang bertujuan untuk mengurangi stunting. Tanggung jawab pemerintah lebih dari sekedar menyediakan fasilitas; hal ini juga mencakup pendanaan, aksesibilitas, pemantauan dan persiapan MoU, serta aspek-aspek

lainnya. Terhadap justifikasi tersebut di atas, Sekretariat BKKBN memberikan klarifikasi sebagai berikut: *“Stunting masih belum tertangani oleh pemerintah karena hanya upaya lintas sektor yang saling berkolaborasi; belum ada MoU dalam merancang MoU dan menggabungkan lintas sektor untuk melaksanakan program stunting. Terkait pembiayaan, pemerintah kecamatan tidak secara langsung menyediakan dana untuk mengatasi stunting ini”*.(bkkbn 2024)

Hal ini tentu sangat penting dalam mengatasi situasi stunting ini. Dimana keadaan stunting sangat mempengaruhi permasalahan tugas pemerintah yang juga mempengaruhi sumber daya manusia yang unggul atau berkualitas yang dapat memberikan jaminan masyarakat dapat memenuhi tuntutan sehari-harinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika sumber daya manusia ini bermasalah, permasalahan yang akan muncul adalah kendala fisik, terbatasnya kesehatan, pendidikan, dan juga akan menyebabkan kurangnya pasokan tenaga kerja untuk menunjang perekonomian. Artinya, hal ini dapat berdampak pada penyelenggaraan negara karena tingkat komponen pembangunan ekonomi juga akan menurun.

Ada yang berpendapat bahwa kemajuan ekonomi sangat dipengaruhi oleh Indeks Kemajuan Manusia. Demikian hasil wawancara Kadis Kesos yang *“Kejadian stunting muncul di wilayah Kecamatan Ampek Angkek antara lain karena sumber daya manusia yang kurang memadai.”*(Kesos 2024)

Kasus stunting ini sudah terjadi selama tiga tahun terakhir; pada tahun pertama tingkat stunting tidak terlalu tinggi; pada tahun kedua tingkat kasus stunting juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya; Dalam setahun terakhir yakni pada tahun 2023, nilai kasus stunting mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari tanda-tanda pernikahan dini, usia lanjut, anak balita, dan anak kurang gizi.

Dari temuan wawancara sebelumnya terlihat apa penyebab tingginya angka stunting di kecamatan ini dan rendahnya sumber daya manusia di kecamatan ini. Melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan, pemerintah juga telah menjamin keberlanjutan program pengendalian stunting. Berikut ini klarifikasi hasil wawancara, khususnya

“Inisiatif penanganan stunting ini telah mengembangkan tindakan spesifik dengan mendorong kerja sama di banyak sektor, kesehatan, sektor bisnis, dan masyarakat. Setelah itu, jadwalkan rapat koordinasi untuk menilai dan merencanakan observasi bulanan secara konsisten.”

Langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan stunting ini tentunya sangat perlu ditindaklanjuti, dengan menentukan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini dikarenakan kasus stunting tidak hanya merugikan masyarakat yang menderita stunting saja,

namun juga pemerintah, sehingga ada keputusan dan program di tingkat nasional untuk menciptakan program yang dapat mengatasi masalah stunting tersebut. Begitu pula dengan pemerintah

Di Kabupaten Religi, mereka menentukan lokus penanganan stunting pada tahun 2025 berdasarkan kesepakatan beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam program penurunan stunting. Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Kecamatan Ampek Angkek adalah sebagai berikut: Hasil wawancara dengan Kadis Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa

“Tentu saja, beberapa tindakan spesifik yang dilakukan dalam situasi stunting telah diputuskan oleh pemerintah pusat/Kabupaten Agam; sisanya diputuskan oleh lintas sektor dan mereka yang bertanggung jawab atas tindakan di masa depan atau persiapan untuk menangani stunting. Salah satu bagian pemerintah sedang mengkaji temuan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan lintas sektor dan membicarakannya dengan pemerintah kecamatan melalui pertemuan kerja sama.”

Adapun wawancara dengan pihak puskesmas sebagai pendata masyarakat stunting yaitu

“Kami berkoordinasi lintas sektor untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut dengan melakukan kontak langsung dengan masyarakat kurang mampu secara ekonomi dalam pemenuhan gizi, memberikan bantuan pangan, mengajak mereka bersosialisasi, dan menyoroti perlunya pengurangan stunting. Membuat program kader penanggulangan stunting, menyelenggarakan kursus pelatihan, memberikan penyuluhan, seminar, workshop, dan berbagai lomba..”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari setiap langkah konkrit di atas, evaluasi dan monitoring serta langkah-langkah yang disiapkan pemerintah lintas sektor sudah efisien dan dapat dikatakan berjalan sesuai target, di awal kegiatan banyak masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan. dilakukan oleh masyarakat Ampek. Pihak lain mungkin juga mendapatkan banyak dukungan finansial sehingga dapat diselenggarakan acara tambahan untuk menurunkan angka stunting.

Kerjasama antar masyarakat untuk membantu pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting. Terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, stunting mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian dalam rangka proses tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Kecamatan Ampek Angkek berupaya bekerja sama agar secara besar-besaran dan secara bersamaan dapat membantu mempercepat penurunan angka stunting. Temuan wawancara Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial berikut ini mengungkap hal tersebut

“Pemerintah Kecamatan Ampek Angkek juga telah bekerja sama dengan dunia usaha, memberikan dukungan keuangan dan lapangan kerja sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Sekaligus kerjasama dengan pihak swasta antara lain KUA, Pertanian, Koperasi, TPPS, Puskesmas, KB”.

Ada pembiayaan pemerintah khususnya untuk stunting agar program pengendalian stunting ini berjalan dengan baik. Hal ini mengingat tugas pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan menghasilkan individu-individu unggul. Wawancara dengan sekretariat BKKBN mengungkap hal ini.

“Pemerintah tidak menganggarkan secara khusus untuk penanganan stunting. Oleh karena itu, hanya hibah lintas sektor yang diberikan atas inisiatif berbagai organisasi yang bergerak dalam penanganan kasus stunting.”

Terkait pembiayaan, bisa dikatakan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator; pemerintah tidak berpartisipasi aktif dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus stunting.

Pembahasan

Berdasarkan temuan kajian di atas, maka keterlibatan pemerintah dalam penanganan kasus stunting cukup penting agar dapat menyelesaikan kegiatan atau program pemerintah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Selain memenuhi tanggung jawab pemerintah negara bagian, ia juga membantu mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan keterbatasan keuangan. Khususnya di kota-kota yang tidak mampu memenuhi tuntutan pribadi, keluarga, dan pemerintah. Temuan dari setiap wawancara yang dilakukan di Kecamatan Ampek Angkek mengungkapkan bahwa salah satu unsur penyebab stunting adalah kurangnya sumber daya manusia; Namun, masukan dari masyarakat juga belum ada.

Gagasan tersebut menjelaskan bahwa hubungan dua arah antara pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia berjalan pada arah yang benar. Temuan ini bertepatan dengan teori siklus kemiskinan dan teori model Pertumbuhan Neoklasik. Pembangunan ekonomi bisa meningkat ketika kualitas sumber daya manusia meningkat; Hal ini sejalan dengan model pertumbuhan neoklasik yang diciptakan oleh Mankiw, dimana komponen sumber daya manusia penggerak pembangunan ekonomi merupakan salah satu variabel produksi.

Modal manusia mempengaruhi pembangunan ekonomi secara positif dan signifikan; sumber daya manusia yang unggul mempunyai dampak besar terhadap pembangunan ekonomi; modal manusia berdampak pada pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Hal ini bertentangan dengan temuan penelitian atau wawancara dengan gagasan

terkini. Kabupaten Ampek Angkek memiliki keterbatasan sumber daya manusia sehingga angka stunting pun mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya di wilayah ini..(Vitariansi Iing 2020)

Penelitian sebelumnya mengkaji Mutia dengan judul Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terpadu. Khususnya dalam pengambilan kebijakan dimana pemerintah kota aceh masih menggunakan kebijakan gubernur dan masih belum berjalan sesuai rencana pemerintah dan juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang ikut serta dalam program stunting, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah dalam mengatasi stunting belum maksimal. Permasalahan serupa juga terjadi di Kecamatan Ampek Angkek; peran pemerintah dalam membangun konvergensi lintas sektor juga belum berjalan, dan dana khusus untuk kasus stunting masih kurang. Hal ini mencerminkan hasil wawancara yang dilakukan pemerintah sesuai perannya namun belum memberikan hasil yang optimal. karena hanya mematuhi pedoman saat ini.(Mutia Rahma.Dkk 2022)

Selain itu, tesis Adam Smith berpendapat bahwa ukuran pasar dan laju pembangunan ekonomi dipastikan dari pertambahan penduduk.pergeseran tingkat perekonomian nasional yang bergantung pada pertambahan jumlah penduduk. Secara alami, produktivitas suatu negara akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pembagian kerja atau spesialisasi diperlukan untuk menjamin hasil kerja..(Mulyaningsih 2000)

Adam Smith berpendapat bahwa kenaikan produksi akan mengikuti pertambahan jumlah penduduk seiring dengan perubahan pembagian kerja. Dalam situasi ini, perlunya pembagian kerja, efisiensi pasar, dan persaingan dalam mendorong pembangunan ekonomi menjadi hal yang digarisbawahi. Gagasan ekonomi tentang relevansi persaingan—bahwa pasar bebas akan mengendalikan harga dan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat—menjadi landasan teori ekonomi. Persaingan ini akan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat dan negara hanya perlu menjamin hukum dan keamanan; itu tidak perlu ikut campur.(Zainul Bahri dan Vinni Aprilianti 2023)

Kemudian juga dibahas penelitian sebelumnya yaitu Rini Archda Saputri (2019), judul penelitiannya Upaya Pemerintah Daerah Penanggulangan Stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitiannya, pemerintah telah memainkan perannya, namun untuk program tersebut masih diperlukan waktu atau proses agar program tersebut dapat terlaksana secara nyata dan terlihat signifikan. 42 Begitu pula di wilayah Kecamatan Ampek Angkek dimana peran pemerintah juga sangat terhambat dalam menyelesaikan program stunting. Terdapat beberapa keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi oleh pemerintah dan lintas

sektor serta masih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam program pengentasan stunting..(Rini Archda Saputri 2019)

Temuan penelitian dan hipotesis penulis juga berbeda karena banyak kejadian stunting menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, dan rumah tangga yang kurang mampu. Penderita stunting sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini berdampak pada masyarakat dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi serta masyarakat dengan tingkat pengangguran yang tinggi karena kurangnya pendidikan yang komprehensif dan pendapatan tenaga kerja yang juga rendah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan analisis penelitian menunjukkan bahwa kajian terhadap peran pemerintah dalam upaya pencegahan stunting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kecamatan Ampek Angkek. Dengan demikian, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Peran pemerintah Kecamatan Ampek Angkek dalam mengatasi penurunan stunting belum optimal, yaitu belum adanya target lintas sektoral untuk mencapai konvergensi, kurangnya komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat, kurangnya komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat. kurangnya fasilitas dan banyaknya TPK dengan luas wilayah yang tidak sesuai.
2. Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan inisiatif pemerintah; Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan mengenai stunting dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh berbagai sektor.
3. Dalam perspektif ekonomi Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Tin / 95:4 dan Surat An-Nisa ayat 9 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi individu yang mengembangkan diri dan menjadi masyarakat yang efisien agar mereka dapat mengembangkan potensinya dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan negara untuk mampu bersaing di dunia kerja serta berinvestasi di bidang pendidikan dan memperkuat perekonomian suatu negara.

DAFTAR REFERENSI

- Aida, A. N. (2019). Pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kejadian stunting di Indonesia. *Jurnal Budget*, 4(1), 128.
- Ayuningtias, N. N. (2018). Pengaruh inflasi pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Samarinda. *Jurnal FEB Unmul*, 1(1), 1.
- Bahri, Z., & Aprilianti, V. (2023). Menuju kesejahteraan keberlanjutan: Pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi. In *Judul Buku* (hal. 2-3). Jakarta: Nasmedia.
- Elly, B. (Informan Puskesmas Biaro). (2024). Wawancara.
- Ing, V. (2020). Analisis keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 1(2), 8.
- Kasi Kesos. (Kecamatan Ampek Angkek). (2024, Mei 17). Wawancara.
- Mulyaningsih. (2000). *Pembangunan Ekonomi* (hal. 12). Jakarta: Cv Kimfa Mandir.
- Rahma, M., et al. (2022). Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi. *Jurnal Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(1), 4–8.
- Saputri, R. A. (2019). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Pemerintah*, 2(2), 152.
- Suhada, L. (2018). Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 174.